

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang sedang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa (Kamaluddin, 1999).

Adanya pembangunan selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif terutama ditunjukkan oleh berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang pada gilirannya merupakan penawaran tenaga kerja yang berlebihan, sedangkan permintaan tenaga kerja dipasar tenaga kerja sangat terbatas.

Menurut CIA (Central Intelligence Agency) World Factbook (2015), Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar diyakini merupakan modal dasar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, namun di sisi lain, dengan pengelolaan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan masalah kependudukan yang sangat krusial terutama di bidang ketenagakerjaan. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan meningkatkan jumlah pertumbuhan tenaga kerja dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

pada saat ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai baik di desa ataupun di kota.

Kurangnya kesempatan-kesempatan kerja yang dapat disediakan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin meningkat akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah besar dan akibatnya akan menjadi beban pembangunan yang lebih besar. Dan ini dijelaskan oleh Mahyudin, (2010) keseimbangan pasar tenaga kerja adalah kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi keseimbangan dalam pasar tenaga kerja mencirikan tidak adanya faktor produksi tenaga kerja yang menganggur atau yang sering disebut sebagai kondisi *full employment*. Akan tetapi pengangguran senantiasa wujud dalam perekonomian, yang menggambarkan gagalnya pasar tenaga kerja mencapai keseimbangannya.

Menurut Untung, (2007) bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang masuk dalam angkatan kerja tidak diimbangi oleh penciptaan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Ketidakseimbangan tersebut akan menimbulkan permasalahan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menandakan bahwa adanya ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Pertambahan penduduk yang tinggi telah berdampak pada jumlah penawaran tenaga kerja, jika tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja akan menambah terjadinya pengangguran. Untuk mempertahankan hidup, mereka akhirnya masuk ke sektor informal atau yang banyak di tekuni oleh masyarakat yaitu berdagang.

Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Keadaan ini dalam jangka pendek akan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Kegiatan ekonomi di sektor informal semakin berkembang seiring dengan bertambahnya angka pengangguran khususnya di perkotaan. Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduknya, dimana pengangguran maupun pengangguran terselubung (*disquised unemployment*) merupakan masalah yang utama. Tebatasnya lapangan kerja dan proses industrialisasi yang terpusat di daerah perkotaan yang padat modal membawa konsekuensi bahwa hanya tenaga kerja terampil saja yang dapat memasuki sektor modern yang formal, sementara sektor informal pada saat yang bersamaan mengalami peningkatan dalam kapasitas intensitas dan jumlah kegiatannya (Mulyadi, 2002).

Pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain :

1. Kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat.
2. Memanfaatkan teknologi sederhana.
3. Pekerjaannya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah.
4. Bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal.
5. Sebagian Besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah kebawah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi selama pembangunan jangka panjang pertama berkisar antara 5-8 persen per tahun, proporsi pekerja sektor informal khususnya perkotaan cenderung meningkat. Dengan demikian, usaha kecil akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mandiri serta dapat memperkuat struktur perekonomian nasional sehingga usaha kecil benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (Prawirokusumo, 2001).

Untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia berjuang untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan pikiran yang dimilikinya, serta tersedianya modal yang ada pada diri serta lingkungannya. Di kota maupun desa, sama-sama tidak mudah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya itu untuk kebutuhan sehari-hari mengingat kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tidak bisa sendiri dalam mendapatkan barang yang dibutuhkannya itu, seseorang harus mencari atau membeli barang yang sudah diperjual belikan ditempat tersebut. Seperti pasar contohnya, di pasarlah seseorang akan menemukan berbagai kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Sektor informal masih mendominasi penyediaan lapangan kerja masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, persentase tenaga kerja Indonesia yang bekerja dalam sektor informal mencapai 59,64 persen pada periode Agustus 2013. Sedangkan sisanya 40,36 persen bekerja dalam sektor formal dan pada tahun 2014 persentase tenaga kerja Indonesia yang bekerja dalam sektor informal sebesar 59,38% sedangkan pada sektor formal sebesar 40,62%.

Kota Padang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera yang saat ini mulai berkembang pesat yang ditandai dengan mulai banyaknya pembangunan pusat bisnis dan ekonomi serta berbagai macam infrastruktur dalam menunjang aktivitas kehidupan di Kota Padang. Sebagai kota yang tergolong besar dan dengan jumlah penduduk yang bertambah tiap tahunnya, Kota Padang tidak luput dari masalah perkotaan yang juga dialami oleh kota-kota besar lainnya yakni masalah ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi tenaga kerja baik wanita maupun pria di sektor informal di Kota Padang mengalami fluktuasi dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Berfluktuasinya jumlah tenaga kerja sektor informal di Kota Padang mengindikasikan bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi tenaga kerja sektor informal di Kota Padang, Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2014).

Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja pada sektor informal Kota Padang berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja pada sektor informal sebanyak 132.466 orang. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 134.555 orang, lalu tahun 2012 menurun menjadi 116.157. Pada tahun 2013 tenaga kerja sektor informal Kota Padang meningkat menjadi 123.990 orang.

Pasar dapat berbentuk sebuah kegiatan ekonomi maupun sebagai pusat kegiatan budaya. Pasar tradisional di mata orang identik dengan tempat yang kotor dan bau. Inilah yang menjadi masalah besar terhadap para calon pembeli untuk mencari kebutuhannya di pasar. Tetapi dari kelemahan tersebut, pasar tradisional memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasar modern yaitu pembeli bisa melakukan tawar-menawar terhadap suatu barang yang diinginkannya. Sebagaimana yang bisa kita temukan di Pasar Raya Padang.

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan tawar menawar harga antara pedagang kaki lima dengan pembeli di Pasar Raya Padang. Namun banyak yang belum tahu tentang Pasar Raya Padang tempo dulu. Sejarah Pasar Raya Padang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kota Padang mulai dari penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan.

Hubungan antara Balai Kota Padang dengan Pasar Raya sudah dimulai sejak berdirinya kantor Balaikota Padang tahun 1948, dari awalnya gedung ini memang diperuntukkan untuk kantor pemerintahan Hindia Belanda. Di sebelah kanannya, dahulu merupakan sebuah lapangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Namun sekarang, lapangan tersebut telah menjadi area Pasar Raya Padang.

Jika menengok pada tahun 1970-an. Di areal yang dulunya terbuka itu, berdirilah bangunan megah yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pembiayaan Belanja Negara). Bangunan megah tersebut terdiri dari pasar Inpres I, II, III dan IV, pasar fase bertingkat, pasar sandang pangan dan pasar blok A.

Pada tahun 2009 silam, gempa 7,8 SR memporak-porandakan gedung megah di Padang termasuk Pasar Raya Inpres I. Gedung-gedung yang dulu berfungsi sebagai Pasar Raya Padang, kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan. Dari sinilah munculnya banyak polemik mulai dari becek, kotor, semrawut, premanisme, banjir dan aksi demo para pedagang.

Pada, Jumat, 24 Juni 2011, gedung baru Pasar Raya Blok I diresmikan oleh walikota Padang saat itu DR. Fauzi Bahar, M.Sc. Pasar ini dibangun dengan dana

APBD (Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah) Kota Padang Tahun 2011 sebesar Rp 42,3 Miliar, empat lantai, dengan jumlah kios dan konter sebanyak 759 unit.

Pasar Raya Padang merupakan pasar terbesar dan merupakan pasar pusat untuk pasar-pasar lain di kota Padang maupun Sumatera Barat. Di Pasar Raya Padang ini terdapat sebanyak 1941 pedagang kaki lima pada tahun 2016. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pedagang lain di pasar – pasar pembantu yang ada di kota Padang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, 2017)

Dalam ilmu ekonomi kita bicara tentang pasar jika ada suatu pertemuan antara orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli suatu barang atau jasa tertentu dengan harga tertentu (Gilarso, 1992). Di pasar banyak terdapat para pembeli dan penjual yang sedang melakukan transaksi, para penjual yang menyediakan dan menjual dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta produk-produk yang banyak jenisnya. Di sinilah terjadinya kegiatan ekonomi yaitu penjual yang sibuk menawarkan berbagai barang yang dijualnya dan para pembeli yang sibuk dengan barang yang dibutuhkannya. Dengan cara tersebut, penjual akan mendapatkan uang dari hasil penjualan

Era globalisasi dan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat, khususnya perekonomian. Pemecahan masalah paling sederhana yang dilakukan guna mencari penghasilan adalah dengan membuka usaha skala kecil dengan menjajakan barang dagangan, makanan dan minuman di tepian jalan atau di pusat-pusat aktifitas ekonomi dengan fasilitas sederhana dan bersifat sementara yang biasa disebut pedagang kaki lima.

Subsektor perdagangan terdiri dari pedagang besar dan pedagang eceran, perdagangan kaki lima sangat mudah jika dibandingkan dengan usaha eceran lain karna untuk memulai usaha kaki lima tidak perlu memiliki izin usaha dan modal yang besar, pedagang kaki lima bisa memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan jalan sebagai tempat berdagang. Sehingga tidak heran semakin banyak pedagang kaki lima ditemukan saat ini. Biasanya pedagang kaki lima ini biasanya banyak ditemukan di pusat keramaian dan pusat-pusat konsumen seperti salah satunya di pasar.

Keberadaan pedagang kaki lima yang juga termasuk kegiatan usaha sektor informal cukup memberi dampak yang baik untuk pembangunan nasional. Soedjana (1981) dalam Widjajanti (2009) mengatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi atau di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan atau pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima yaitu modal. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam suatu produksi. Modal usaha yang relatif besar jumlahnya, akan memungkinkan suatu unit penjualan dengan banyak jenis produk. Dengan cara itu, pendapatan yang akan diperoleh juga akan semakin besar. Akan tetapi, pasar tradisional mayoritas pedagangnya berasal dari masyarakat menengah kebawah. Jadi, dalam mendapatkan suatu modal kebanyakan para pedagang masih mengandalkan hasil pertanian maupun ketrampilannya saja. Padahal jika para pedagang pasar tersebut ingin menambah

modal, para pedagang bisa meminjam modal tersebut di bank atau BPR. Pedagang harus pintar-pintar atau berani dalam menentukan modal, karena ketersediaan modal yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja sektor informal, maka penelitian akan penulis berjudul yaitu “**Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?
2. Bagaimana pengaruh lama jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

2. Untuk mengetahui pengaruh lama jam kerja terhadap pendapatan pedagang di kaki lima Pasar Raya Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Pengembangan ilmu terutama ilmu ekonomi mikro dan ekonomi kewirausahaan.
2. Pengambil kebijakan yaitu Dinas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar dalam mengambil suatu kebijakan lebih memperhatikan sektor informal.
3. Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis selanjutnya, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai referensi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai pendekatan teori dan penyajian penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur serta hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan model yang akan digunakan, populasi dan sampel, sumber data dan definisi operasional serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perekonomian di Kota Padang, pasar-pasar yang ada di Padang, Pasar Raya Padang, tipe pasar dan karakteristik variabel penelitian.

BAB V : PENEMUAN EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis hasil estimasi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan juga pemberian saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

